

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Human trafficking atau yang dikenal dengan perdagangan manusia merupakan permasalahan serius dalam dunia internasional. Dalam Artikel 3, Protokol yang mencegah, menekan dan menghukum perdagangan manusia, atau yang lebih dikenal dengan *Palermo Protocol*, human trafficking didefinisikan sebagai perekrutan, transportasi, transfer, menjaga atau menerima manusia, dengan cara diancam atau penggunaan kekuatan atau bentuk lain dari paksaan, dari penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuatan atau posisi mudah diserang atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mencapai persetujuan seseorang untuk mengontrol orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, minimal, eksploitasi prostitusi atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, dengan memaksa pekerja, perbudakan atau tindakan mirip perbudakan, kerja paksa atau penghilangan salah satu organ tubuh.<sup>1</sup>

Hampir seluruh negara di dunia memiliki masalah human trafficking. Di kawasan Asia, kasus Human Trafficking banyak terjadi pada negara-negara miskin, negara berkembang dan negara-negara yang khususnya berada di bagian Asia Selatan dan Asia Tenggara. Laporan pemerintah negara Amerika Serikat mengkategorikan negara-negara kedalam kelas-kelas resiko pada tiga tingkatan.

---

<sup>1</sup> Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and

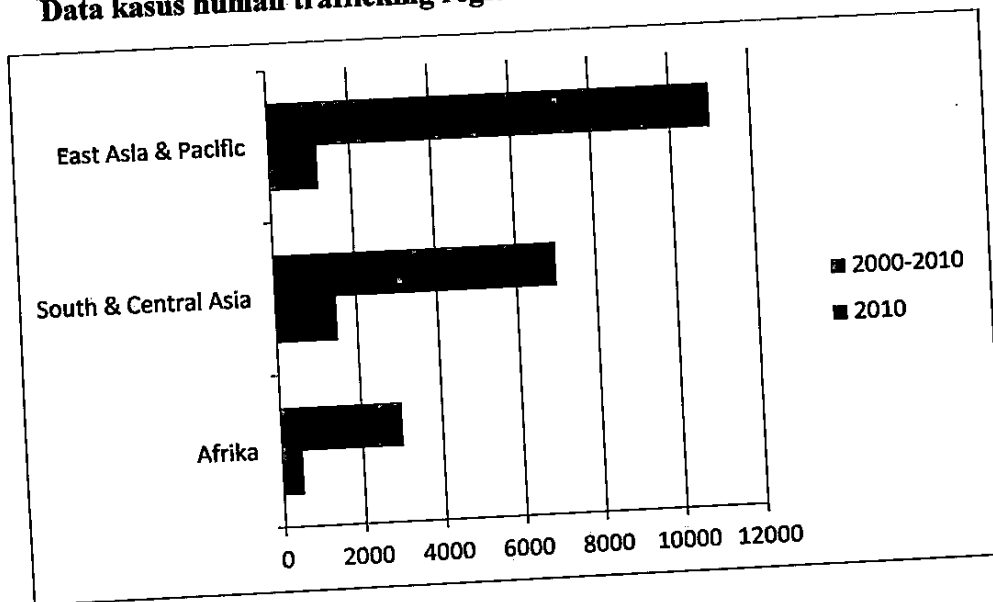
Tingkat Satu terdiri dari negara-negara yang dianggap oleh Departemen AS yang memiliki masalah human trafficking tetapi sepenuhnya memiliki standar minimum dalam aksi memproteksi korban human trafficking sebagai upaya untuk menghilangkan kasus trafficking dari negaranya. Tingkat dua terdiri dari negara-negara yang berada antara Tingkat Satu dan Tingkat Tiga. Sedangkan Tingkat Tiga sendiri terdiri dari negara-negara yang tidak memiliki standar hukum dalam upaya untuk memproteksi kasus human trafficking dan pemerintah negaranya tidak memiliki usaha untuk mewujudkannya.<sup>2</sup>

Berikut ini, adalah tabel kasus human trafficking yang terjadi di kawasan regional Asia dan Afrika. Dari tabel di bawah ini dapat dilihat bahwasanya pada tahun 2000-2010, kasus human trafficking paling banyak terjadi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Kemudian pada posisi kedua dalam statistik tahun 2000-2010, negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Asia Tengah menempati posisi kedua. Sedangkan jika dilihat kasusu human trafficking pada tahun 2010 sendiri, kasus yang terjadi di kawasan Asia Selatan dan Asia Tengah lebih banyak dibandingkan dengan kasus human trafficking yang terjadi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Maka dengan data yang penulis ambil dari laporan IOM ini dapat disimpulkan bahwasanya human trafficking yang terjadi di negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Asia Tengah, perkembangannya lebih pesat daripada kasus human trafficking yang terjadi di kawasan Asia Timur dan Pasifik pada tahun 2010.

---

<sup>2</sup> Trafficking in Persons Report, 10<sup>th</sup> Edition, Cetakan Department of State, United States of America, Juni 2010, hal. 23

**Table 1.1**  
**Data kasus human trafficking regional Asia dan Afrika 2000-2010<sup>3</sup>**



Source : IOM Trafficking Case Data

Dengan jumlah kasus human trafficking terbanyak di tahun 2010, kawasan Asia Selatan dan Asia Tengah kemudian lebih banyak menarik sorotan organisasi internasional dalam permasalahan human trafficking. Khususnya kawasan Asia Selatan sendiri dimana di kawasan ini masih banyak terjadi konflik antar negara-negaranya maupun konflik didalam negeri masing-masing negara.

Berikut ini adalah data dengan jumlah kasus human trafficking yang terjadi di negara-negara di kawasan Asia Selatan. Kasus human trafficking yang dicatat dari tahun 2000 hingga 2010, dan kasus yang tercatat pada tahun 2010 sendiri.

<sup>3</sup> "IOM Case Data : Global Figures & Trends Human Trafficking-May 2011", publikasi International Organization for Migration (IOM), 2011 hal.4

**Table 1.2**  
**Human Trafficking Case Assisted in South Asia<sup>4</sup>**

<b>Countries in South Asia</b>	<b>Total number of cases assisted : (year) 2010</b>	<b>Total number of case assisted : (years) 2000-2010</b>
Bangladesh	37	625
India	15	741
Sri Lanka	13	45
Pakistan	2	5
<b>REGIONAL TOTAL</b>	<b>67</b>	<b>1,416</b>

Source : IOM Trafficking Case Data

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa negara Bangladesh pada tahun 2010 sendiri memiliki kasus 0,59% dari kasus yang terjadi dari tahun 2000-2010. India pada tahun 2010 memiliki kasus 0,02% dari total kasus pada tahun 2000-2010. Kasus human trafficking di Sri Lanka pada tahun 2010 merupakan 0,3% dari total kasus pada tahun 2000-2010. Dan Pakistan pada tahun 2010 memiliki kasus human trafficking dengan jumlah 0,4% dari total kasus pada tahun 2000-2010. Maka hal ini dapat disimpulkan bahwa jumlah perkembangan kasus human trafficking terbanyak di kawasan Asia Selatan adalah Bangladesh pada urutan pertama, Pakistan pada urutan kedua, kemudian Sri Lanka pada urutan ketiga dan

Namun meskipun demikian, dari laporan U.S. Department of state, negara-negara di kawasan Asia Selatan dinilai telah cukup memiliki usaha dalam menegakkan hukum terkait human trafficking. Seperti yang telah dijelaskan oleh penulis diatas, U.S. Department of State membagi upaya pemerintah negara dalam menangani human trafficking kedalam tiga bagian (Tier 1, Tier 2, dan Tier 3). Selain itu, U.S Department of State juga menambahkan istilah *Tier 2 Watch List* bagi negara-negara yang dianggap telah memiliki hukum terkait human trafficking namun masih dinilai kurang dalam upaya penanganan terhadap permasalahan tersebut. Berikut ini, penulis akan berikan gambaran negara-negara di Asia Selatan terkait usaha mereka dalam menangani permasalahan human trafficking sesuai dengan prosedur U.S. Department of State.

**Tabel 1.3**

**Status Negara-negara Asia Selatan dalam Menangani Human Trafficking di Negaranya<sup>5</sup>**

<b>Negara</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
<b>Bangladesh</b>	Tier 2	Tier 2 Watch List	Tier 2 Watch List	Tier 2 Watch List
<b>India</b>	Tier 2 Watch List	Tier 2 Watch List	Tier 2 Watch List	Tier 2
<b>Sri Lanka</b>	Tier 2 Watch List	Tier 2 Watch List	Tier 2 Watch List	Tier 2 Watch List
<b>Paskistan</b>	Tier 2	Tier 2 Watch List	Tier 2	Tier 2

Dari negara-negara di Kawasan Asia Selatan, Sri Lanka merupakan negara yang pemerintahnya dianggap kurang dalam menangani kasus human trafficking yang terjadi. Dari tabel diatas dapat dilihat dari negara-negara di kawasan Asia

<sup>5</sup> "Tier Placements; Trafficking in Persons Report", U.S. Department of State, diakses dari

Selatan, Sri Lanka merupakan satu-satunya negara yang tidak memiliki perubahan dalam *Tier Placement* sesuai dengan laporan U.S. Department of States. Makalah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Sri Lanka tidak memiliki perkembangan usaha dalam menangani human trafficking di negaranya. Selain itu, Dalam laporan terkait human trafficking milik U.S. Department of state pada tahun 2009 disebutkan bahwa Sri Lanka merupakan negara asal (*origin*), serta negara tujuan (*destination*), bagi laki-laki, perempuan, maupun anak-anak untuk diperdagangkan dan dimanfaatkan untuk eksploitasi seksual dan pekerja buruh.<sup>6</sup>

Selain kurang dalam upaya menangani human trafficking, Sri Lanka juga merupakan negara yang mempunyai banyak permasalahan terkait migrasi. Hal ini juga terkait status Sri Lanka sebagai sebuah negara berkembang yang memiliki latar belakang konflik politik dalam negeri Sri Lanka sendiri. Konflik politik di Sri Lanka mulai marak pada tahun 1970-an, dimana terdapat dua kubu besar yang menjadi penyebab konflik politik tersebut. Pertama adalah kelompok separatisme Tamil atau yang bisa dikenal *Liberation Tigers of Tamil Eelam*, yang merupakan kumpulan orang-orang Tamil Sri Lanka yang menyerukan separatisme dan selalu diketahui memiliki konflik etnis dengan suku Sinhala di Sri Lanka. Dan kubu kedua adalah komunitas Sinhala yang menginginkan untuk merubah rezim pemerintahan yang telah ada.<sup>7</sup> Dengan banyaknya permasalahan konflik internal dalam negeri, banyak penduduk di Sri Lanka yang merasa tidak aman dan menginginkan untuk mencari penghidupan yang lebih baik di luar negeri.

---

<sup>6</sup> "IOM Sri Lanka, Briefing Note June 2010", publikasi IOM Sri Lanka, Colombo, 2010, hal.1

<sup>7</sup> Abeyratne, Sirimal. *Economic Roots of Political Conflict : The Case of Sri Lanka*, department of Economics, University of Colombo, hal. 3

sehingga tingkat migrasi di Sri Lanka sangatlah tinggi dan hal ini juga yang menjadi salah satu akar dari terjadinya human trafficking.

Dengan permasalahan human trafficking dan illegal smuggling yang terjadi di Sri Lanka, maka hal ini menggerakkan sebuah organisasi antar-negara yaitu IOM (*International Organization for Migration*) yang bergerak dalam permasalahan migrasi untuk membantu pemerintah Sri Lanka dalam menangani permasalahan tersebut.

*International Organization for Migration (IOM)* merupakan organisasi yang bergerak pada bidang migrasi. Dalam konstitusinya, tujuan berdirinya IOM adalah untuk menertibkan migrasi yang terjadi di seluruh dunia secara manusiawi dan sesuai hak-hak manusia.<sup>8</sup> Demi menjalankan tujuannya tersebut, maka IOM diharuskan untuk andil dalam segala urusan yang berkaitan dengan hal-hal yang merusak ketertiban migrasi di dunia seperti migrasi gelap, penyelundupan manusia dan juga human trafficking. Oleh karena itulah, IOM dengan latar belakang organisasi di bidang migrasi juga turut andil dalam membantu pemerintah negara-negara dalam menangani permasalahan human trafficking.

Sri Lanka sendiri masuk menjadi *member state* IOM pada tahun 1990 dan baru membuka kantor pertamanya pada tahun 2002 di Colombo. IOM sebagai *intergovernmental organization* memiliki komitmen pada prinsip untuk menertibkan migrasi secara manusiawi dan menjadikan para imigran bermanfaat bagi masyarakat. Dalam misinya juga, sebagai organisasi internasional dalam

bidang migrasi, IOM bekerja dengan mitranya di masyarakat internasional untuk membantu dalam menghadapi pertumbuhan tantangan dalam manajemen migrasi, meningkatkan pemahaman tentang isu-isu migrasi, mendorong perkembangan sosial dan ekonomi melalui migrasi, dan menjunjung tinggi martabat manusia dan kesejahteraan imigran.

*IOM is committed to the principle that humane and orderly migration benefits migrants and society.*

*As the leading international organization for migration, IOM acts with its partners in the international community to :*

- a. Assist in meeting the growing operational challenges of migration management.*
- b. Advance understanding of migration issues.*
- c. Encourage social and economic development through migration.*
- d. Uphold the human dignity and well-being of migrants.<sup>9</sup>*

Dengan misi tersebut, dan terutama dengan latar belakang negara Sri Lanka yang tergolong kedalam negara berkembang yang masih banyak permasalahan sosial seperti konflik etnis, gerakan nasionalis dan banyaknya jumlah imigran yang hendak menjadi pekerja ke luar negeri, IOM bekerja sama dengan pemerintah Sri Lanka berusaha untuk menangani permasalahan migrasi khususnya dalam kasus human trafficking di negeri Sri Lanka.

---

<sup>9</sup> *IOM Mission*, diambil dari [www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-iom-1/mission.html](http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-iom-1/mission.html), diakses pada hari Jum'at, 12 September 2014



## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan kasus human trafficking yang terjadi di negara Sri Lanka.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran *International Organization for Migration* (IOM) dalam menangani permasalahan human trafficking di Sri Lanka.

## **C. Rumusan Masalah**

“Bagaimana upaya *International Organization for Migration* (IOM) dalam usaha untuk menangani masalah human trafficking di Sri Lanka?”

## **D. Kerangka Pemikiran**

Untuk membantu menjelaskan peran IOM dalam mengatasi human trafficking di Sri Lanka, maka penulis menggunakan konsep Organisasi Internasional. Konsep seperti yang diungkapkan Mokhtar Mas'ood adalah abstraksi yang mewakili suatu obyek, sifat suatu benda, atau fenomena tertentu.<sup>10</sup>

Organisasi internasional adalah organisasi antar negara yang diikat oleh perjanjian untuk menjamin tujuan bersama.<sup>11</sup> Mengacu pada Fungsi (Roles) organisasi internasional menurut Karen Mingst adalah organisasi internasional,

---

<sup>10</sup> Mokhtar Mas'ood, *Imu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta : LP3S, 1994) hal. 93-94

baik organisasi NGO maupun IGO seperti PBB, Bank Dunia dan IOM, dapat memainkan peran kunci di setiap level analisisnya, ada tiga fungsi Organisasi Internasional menurut tingkat analisisnya<sup>12</sup> :

*Pertama*, di tingkat Sistem Internasional yaitu Organisasi Internasional mempunyai fungsi untuk berkontribusi bersama dengan negara-negara di dunia untuk menangani suatu masalah internasional. Sebagai contoh, Organisasi Internasional dan Negara Negara di dunia bekerjasama di bawah sistem Perserikatan Bangsa Bangsa dalam menangani masalah Internasional. Organisasi Internasional juga berfungsi untuk mensurvei dan mengumpulkan segala informasi di dunia sebagai contoh Bank Dunia yang mengumpulkan informasi tentang statistik ekonomi di dunia atau juga IAEA yang memonitor pergerakan bahan baku nuklir yang keluar dari suatu Negara. Organisasi Internasional mempunyai fungsi juga untuk membantu penyelesaian perselisihan atau konflik di dunia contohnya penyelesaian perselisihan tentang prosedur perdagangan oleh WTO atau pengadilan Internasional. Organisasi Internasional melakukan kegiatan operasional organisasi misalnya program penanggulangan pandemi di dunia oleh WHO (World Health Organization) atau pembuatan kamp pengungsi oleh PBB komisi bidang pengungsi. Organisasi Internasional membantu dalam proses bargaining dalam suatu wilayah contohnya European Council of Ministers yang menyediakan ruang untuk setiap perdana menteri untuk bertemu dan bernegosiasi. Selain itu Organisasi Internasional juga memiliki otoritas untuk membuat sebuah

---

<sup>12</sup> Karen Mingst, *Essentials of International Relations*, University of Kentucky, hal.241-242.

ketetapan internasional sebagai contoh Organisasi Internasional membuat ketetapan perdagangan dan makanan internasional.

*Kedua*, fungsi Organisasi Internasional terhadap negara yaitu organisasi internasional digunakan oleh negara sebagai instrument politik luar negeri. Sebagai contoh, kasus yaitu Negara Nordic yang menggunakan PBB untuk mendelegasikan perwakilannya untuk pengembangan Internasionalnya. Organisasi Internasional untuk melegitimasi politik luar negeri contohnya Amerika Serikat yang melegitimasi tindakan militernya di korea dan perang gulf melalui PBB. Organisasi Internasional juga berfungsi mencuatkan informasi suatu negara di dunia Internasional. Selain itu Organisasi Internasional juga berfungsi untuk menentukan kelakuan suatu Negara dalam arti mencegah negara-negara dari pengambilan kebijakan dan menghukum Negara-negara dari suatu kebijakan contohnya saja pengembargoan terhadap Afrika Selatan, Rhodesia, Iraq, dan Serbia.

*Ketiga*, fungsi Organisasi Internasional dalam hubungan terhadap individu yaitu Organisasi Internasional menjadi tempat dimana individu bisa bersosialisasi terhadap norma-norma internasional. Contohnya adalah pembelajaran delegasi PBB dalam norma diplomatic. Selain itu Organisasi Internasional juga menjadi tempat dimana individu bisa mempelajari tentang persamaan dan perbedaan suatu negara di dunia, misalnya para partisipan mempelajari satu sama lain di

Adapun fungsi Organisasi Internasional menurut Harold K. Jacobson dapat dikategorikan dalam lima hal pokok<sup>13</sup> :

1. Fungsi informasi termasuk didalamnya adalah pengumpulan, analisa, pertukaran dan desiminasi data dan informasi. Guna menjalankan fungsi ini, organisasi internasional dapat mempergunakan staffnya atau menyediakan suatu forum dimana konstituennya dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
2. Fungsi normatif meliputi pendefinisian dan pendeklarasian suatu norma standar. Fungsi ini tidak memasukkan instrumen yang memiliki efek mengikat secara hukum, tetapi sebatas pernyataan-pernyataan yang mempengaruhi lingkungan domestik dan internasional.
3. Fungsi Pembuatan Peraturan yang hampir sama dengan fungsi normatif tetapi lebih menekankan pada efek yang lebih mengikat secara hukum. Agar produk yang dihasilkan mengikat secara hukum, maka negara anggota harus melakukan ratifikasi atas suatu peraturan dan peraturan itu hanya berlaku bagi yang meratifikasi saja.
4. Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan dimana dalam hal ini organisasi internasional menetapkan ukuran-ukuran pelanggaran dan menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap pelanggaran suatu peraturan.
5. Fungsi Operasional yang meliputi penggunaan sumber daya organisasi.  
Misalkan penggunaan bantuan teknis dan keuangan serta kekuatan militer.

---

<sup>13</sup> Harold K. Jacobson, *Networks of Interdependence*, dalam Diktat "Organisasi dan Administrasi Internasional" oleh : Sugito, SIP, M.Si.

Dengan demikian peranan organisasi internasional akan mampu memberikan pedoman untuk bertindak pada situasi tertentu di lingkungan internasional. Dapat dikatakan pula bahwa peranan organisasi internasional merupakan hasil reaksi dari situasi internasional yang terjadi. Jadi pengaruh dari berdirinya organisasi internasional dalam kehidupan pada sebuah negara baik pada masa krisis maupun saat membangun adalah untuk meningkatkan kesejahteraan berbangsa, karena organisasi internasional mempunyai tujuan untuk mengembangkan politik dan keamanan nasional di satu pihak serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan social di pihak lain.

Melihat fungsi dari organisasi internasional diatas, maka dapat dikatakan bahwa IOM merupakan organisasi internasional yang berfungsi sangat luas dalam hal ini khususnya kegiatan operasional organisasi dengan menjalankan fungsi yang bersifat khusus yaitu dalam bidang sosial atau dalam hal ini permasalahan human trafficking. Peranan IOM ini merupakan sebuah konsep yang dibentuk oleh dunia internasional untuk menangani permasalahan migrasi, yang salah satunya ialah human trafficking, di berbagai belahan dunia, serta merupakan organisasi internasional yang bergerak dalam bidang kemanusiaan yang didukung oleh negara-negara anggotanya. IOM berupaya agar aktifitas-aktifitas yang dijalankan sesuai dengan tujuan utama yang ingin dicapai, yaitu menertibkan migrasi, membantu dalam menghadapi pertumbuhan tantangan dalam manajemen migrasi, meningkatkan pemahaman tentang isu-isu migrasi, mendorong perkembangan sosial dan ekonomi melalui migrasi, dan menjunjung tinggi

Sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam bidang migrasi, IOM memiliki fokus strategi dalam menjalankan program kerjanya, hal tersebut antara lain<sup>14</sup> :

1. Menyediakan pelayanan yang memberikan rasa aman, dapat dipercaya, fleksibel, dan pembiayaan efektif bagi yang membutuhkan bantuan dalam hal migrasi internasional.
2. Untuk meningkatkan rasa kemanusiaan dan mengatur (management) migrasi dan menghormati hak asasi para imigran yang sesuai dengan aturan internasional.
3. Memberikan nasehat ahli, penelitian, kerjasama secara teknis dan bantuan operasional kepada negara-negara, organisasi antar-negara maupun organisasi non-negara (*non-governmental organization*), dan *stakeholder* yang lain, dalam hal untuk membangun kapasitas nasional, dan memfasilitasi urusan para imigran dalam lingkup kerjasama internasional, regional, maupun bilateral.
4. Berkontribusi dalam perkembangan ekonomi dan sosial negara-negara melalui penelitian dan program yang berkaitan dengan migrasi untuk kepentingan migrasi itu sendiri.

Permasalahan human trafficking yang terjadi di Sri Lanka merupakan permasalahan sosial yang melibatkan berbagai golongan. Human trafficking di Sri Lanka pun dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor sosial seperti konflik, kebutuhan

<sup>14</sup> IOM Mission, dalam <http://www.iom.int/cms/en/cites/iom/home/about-iom-1/mission.html>

lapangan kerja, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, IOM sebagai organisasi internasional yang bergerak pada bidang sosial, harus mampu memenuhi fungsi yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjalankan fungsinya, IOM bekerja sama dengan pemerintah, NGOs, kelompok masyarakat, serta LSM sebagai lembaga kemasyarakatan. IOM harus mampu menciptakan lingkungan dan perangkat kebijakan yang tidak hanya memungkinkan pelaksanaan tujuan utama secara efektif, namun juga harus dapat merangsang pemikiran dan pembaharuan yang efektif serta dapat diterima oleh masyarakat setempat.

Permasalahan human trafficking sendiri sudah banyak terjadi di beberapa negara di dunia dan sudah banyak bentuk upaya Organisasi Internasional mengatasi permasalahan tersebut. Contohnya adalah dalam upaya IOM dalam menangani permasalahan human trafficking di Kalimantan Barat, IOM memprakarsai secara langsung program pendidikan masyarakat dan Kampanye publik sosialisasi perdagangan orang bekerja sama dengan Polda Kalbar, Pemkot Pontianak, Australian Federal Police (AFP), MTV Exit dan Mata Enggang.<sup>15</sup> Sedangkan peran IOM dalam menangani permasalahan human trafficking yang ada di beberapa negara, secara general mereka mempunyai strategi utama yakni dalam hal pencegahan, bantuan secara teknis, dan bantuan secara langsung.<sup>16</sup> Dalam hal ini, contoh bentuk-bentuk upayanya adalah seperti penyuluhan tenaga kerja sebelum diberangkatkan ke negara asing, pemberian pendidikan bagi para

---

<sup>15</sup> Eka Jaya Putra, *Peran Unit Counter-Trafficking IOM Indonesia dalam menangani Human Trafficking di Kalimantan Barat*, eJournal Hubungan Internasional Universitas Mulawarman vol(1) : 4. Hal. 1187

<sup>16</sup> Counter Trafficking, dalam <http://www.iom.int/cms/countertrafficking>, diakses pada Kamis, 18 September 2014

anak-anak kecil dan remaja, dan bantuan kepada para korban human trafficking dalam hal pemulihan psikologis mereka.

### **E. Hipotesa**

Berdasarkan dari Latar Belakang Permasalahan dan Kerangka Pemikiran di atas maka dapat di ambil satu Hipotesa yaitu IOM sebagai organisasi internasional yang bergerak migrasi, mempunyai tugas sesuai dengan misi dan fungsinya yaitu antara lain :

1. Bekerja sama dengan pemerintah Sri Lanka dalam mengadakan penelitian dan menyebarkan informasi mengenai human trafficking di Sri Lanka sebagai upaya IOM dalam menjalankan fungsi informasi sebagai suatu Organisasi Internasional
2. Memberikan pelatihan berupa pelatihan kepada aktor-aktor negara seperti polisi dan hakim dalam peningkatan kesadaran terkait human trafficking
3. Pemberian bantuan teknis kepada para korban human trafficking sebagai fungsi operasional IOM sebagai Organisasi Internasional

### **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa Library Research dengan memanfaatkan data-data skunder yang pengumpulannya



website yang telah diolah menjadi data dan bisa dijadikan bahan kajian dalam penyusunan skripsi ini.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Peran IOM dalam menangani human trafficking di Sri Lanka” dibatasi dengan fakta-fakta terhadap kasus human trafficking di Sri Lanka antara tahun 2007-2010, dan disertakan data-data terbaru atas peran-peran dan program yang dilakukan IOM untuk menangani masalah human trafficking di Sri Lanka. Dan dalam hal ini tidak menutup kemungkinan dalam penganalisaan nanti tidak sedetail pengaplikasian penelitian sesungguhnya. Akan tetapi diusahakan untuk tetap relevan.

### **H. Sitematika Penulisan**

#### **Bab I :**

Berisi pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Rumusan Masalah, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, dan Sitematika Penulisan. Latar Belakang masalah menjelaskan secara ringkas terbentuknya IOM dan masuknya IOM ke negara Sri Lanka untuk membantu permasalahan human trafficking. Selanjutnya penulis menarik permasalahan dan merumuskannya dalam rumusan masalah. Untuk menjawab rumusan masalah, maka penulis menggunakan konsep

organisasi internasional dan melakukan hipotesa akan hasil dari penelitian ini

## **Bab II :**

Berisi penjelasan dan gambaran spesifik tentang kasus human trafficking di Sri Lanka. Dalam hal ini, penulis akan lebih menspesifikkan penelitian yaitu pada permasalahan human trafficking di Sri Lanka antara tahun 2007-2010. Penulis juga akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan human trafficking di Sri Lanka.

## **Bab III :**

Berisi penjelasan mengenai IOM (International Organization for Migration). Penulis akan menjelaskan awal mula terbentuknya IOM, *scoop* atau jangkauan bidang IOM dan upaya IOM dalam menangani human trafficking di beberapa negara.

## **Bab IV :**

Berisi tentang penjelasan bagaimana peran IOM dalam menangani masalah human trafficking di Sri Lanka. Penulis akan menjawab rumusan masalah dengan menggunakan teori yang sudah dijabarkan pada Bab I. Pada Bab ini juga akan dikaitkan peran IOM dalam menangani human trafficking di Sri Lanka sesuai dengan peran fungsi Organisasi Internasional dalam konsep organisasi internasional.

## **Bab V :**

Berisi kesimpulan tentang peran IOM dalam menangani permasalahan human trafficking di Sri Lanka. Penulis akan menarik garis besar inti dari hasil

ini dan akan di jelaskan beritanya yang didapatkan terhadap penelitian yang